

## MODEL PENGUKURAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA KANTOR KECAMATAN TUTUR KABUPATEN PASURUAN

<sup>1</sup> Khumaidi, <sup>2</sup> Melin Riska Yulia Sari

Universitas Yudharta Pasuruan

[khumaidi@yudharta.ac.id](mailto:khumaidi@yudharta.ac.id), [melienriskal101998@gmail.com](mailto:melienriskal101998@gmail.com)

PASURUAN JAWA TIMUR - INDONESIA

### Abstract

*The performance of government agencies must always be improved because it is in the public spotlight. The public wants a government to have a good performance in carrying out its duties and responsibilities in accordance with applicable laws. Human resources are a very influential factor in carrying out the performance of an agency. Improved performance of government agencies can be influenced by several factors. This study aims to determine employee operational audits and accountability in improving agency performance in Tuter District. The method used in this study is qualitative with descriptive analysis method. The object of this research is the Tuter District Office while the subjects of this study are the employees Tuter district. Data collection techniques in this study using triangulation techniques is observation, interviews and documentation. Data analysis techniques in this study are data collection, data reduction, data presentation and conclusions. The results of this study indicate that the performance of the Tuter District office has decreased, this is due to employee operations that are not appropriate and not in accordance with the conditions so that individual performance can not be maximized and also the value of accountability that does not meet the target.*

**Keywords:** *Accountability; Agency Performance; Operational Audit; Government*

### Abstrak

Kinerja instansi pemerintah harus selalu ditingkatkan karena menjadi sorotan publik. Masyarakat menginginkan pemerintah memiliki kinerja yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam menjalankan kinerja suatu instansi. Peningkatan kinerja instansi pemerintah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui audit operasional pegawai dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja instansi di Kecamatan Tuter. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Objek penelitian ini adalah Kantor Kecamatan Tuter sedangkan subjek penelitian ini adalah pegawai Kecamatan Tuter. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja kantor Kecamatan Tuter mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena operasional pegawai yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan kondisi sehingga kinerja individu tidak dapat maksimal dan juga nilai akuntabilitas yang tidak sesuai. tidak memenuhi target.

**Kata Kunci:** *Akuntabilitas; Audit Operasional; Kinerja Instansi; Pemerintah*

Open Access at:<http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, disusun suatu perencanaan pembangunan yang berasal dari perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Tuter sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Kecamatan Tuter. Kewenangan tersebut adalah dalam hal menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi.

Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan pembangunan yang terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Tuter sampai dengan triwulan kedua tahun 2020, telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan.

Penyusunan rencana kerja anggaran harus mempertimbangkan berbagai alternatif. Sebenarnya, fungsi penyusunan RKA adalah untuk merencanakan penggunaan dana agar bisa seefisien mungkin. Sehingga perlu juga diingatkan bahwa anggaran sebagai alat bagi manajemen akan dapat bermanfaat lebih baik apabila disusun lebih teliti. Kemudian, manajemen dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan organisasi.

Rencana Kerja OPD Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan Tahun 2020, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah.

Menurut M. Nafarin(2009:4)"Rencana kerja adalah tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sukmadinata (2009:53-60), penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Penggunaan pendekatan deskriptif karena datanya berupa laporan dan kata-kata yang tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, tetapi hanya menggambarkan suatu gejala atau keadaan yang diteliti secara apa adanya serta diarahkan untuk memaparkan fakta-fakta,

Alasan menggunakan jenis penelitian kualitatif karena : pertama, penelitian ini berusaha menganalisis faktor-faktor penilaian kinerja instansi supaya kinerja di suatu instansi mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Kedua, data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dan analisis dokumen fakta-fakta dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya ditarik kesimpulan.

Objek dalam penelitian ini adalah Kantor Kecamatan Tukur. Subjek penelitian adalah pegawai yang ada di Kecamatan Tukur. Teknik – teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode triangulasi.

Miles dan Huberman (2007:15-19) dalam Rahmawati dan Rusli (2014) langkah – langkah analisis data yaitu pertama pengumpulan data, mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. Ketiga, penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel. Terakhir, Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola pola pengarah dan sebab akibat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana Kerja Kecamatan Tukur merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya sesuai dengan pendapat M NAFARIN (2009:4).

Rencana Kerja OPD Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan Tahun 2020, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Kecamatan Tukur.

Rencana Kerja OPD Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan Tahun 2020, akan dijadikan

sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis OPD Kecamatan Tuter. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Tuter.

Anggaran belanja / pengeluaran Kecamatan Tuter tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 1.280.550.200,- dari jumlah tersebut dapat terealisasi.

Di dalam perjalanan selama pelaksanaan pekerjaan, dijumpai pula beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan-hambatan umum yang dijumpai adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
2. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
3. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap program, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi output kegiatan yang menunjang efektifitas program/kegiatan.

Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, OPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan program/kegiatan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang disimpulkan bahwa perlu adanya Strategi mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan, perlu adanya Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan Tukur dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan sarana prasarana wilayah, dan perlu adanya Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016. *Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan di Kabupaten Pasuruan*. 14 Desember 2016. Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 69. Pasuruan.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. *Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- Perwirasari, Fajar Bayu Putri. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Rahmwati., Rusli, Andika. (2014). Pengaruh audit kinerja terhadap good corporate governance pada Kabupaten Luwu. *Jurnal Equilibrium*, 4 (2), 82-99.
- Said, Jamilah., Alam, Md. Mahmudul., Azizal, Mohammad bin Abd Aziz. (2015). Public accountability system: empirical assessment of public sector of Malaysia. *Asian Journal of Scientific Research*, 8 (2), 225-236.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.

Sukmadinata, Nana Syaodih. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosda Karya

Syachbbrani, Warka., Baharuddin, Sitti Mujahida. (2019). Implementasi Audit operasional dalam prinsip transparansi dan akuntabilitas pada Kantor Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene. *Bongay Journal of Research in Management*, 2 (2), 47-57.

Ulimpa, Yohanis S., Sondakh, Jullie J., Runtu, Treesje. (2018). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi Daerah Di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 302-307.

Ulum, Ihyaul. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

[Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004. Sistem perencanaan pembangunan nasional.](#)

Veithzal, Rivai. (2008). *Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Wahyuni, Endang Sri., Rosmida. (2016). Analisis kinerja aparat pemerintah daerah (studi empiris pada Pemetrintah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Inovasi dan Bisnis*, 4 (2), 105-112.

Wardhana, Gede Ari Surya., Rasmini, Ni Ketut., Astika, Ida Bagus Putra. (2015). Pengaruh kompetensi pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan komitmen organisasi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4.09, 571-598.

Wibowo. (2017). *Manajemen sumber daya manusia*. Surabaya: CV. R. A. De. Rozarie.

Zawawi, M. (2016). Model akuntabilitas kinerja SKPD dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 1 (1), 8-13.

\_\_\_\_\_. (22 Juli 2018), Pelayanan Publik dalam Pemerintahan yang Baik (Good Governance) <https://faktualnews.co/2018/07/22/pelayanan-publik-dalam-pemerintahan-yang-baik-good-governance/89698/>